



OPTIMALISASI SISTEM INFORMASI UNTUK EFEKTIFITAS PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) INSPEKTORAT KABUPATEN BONDOWOSO

Lukman Fakhid Lidimilah ¹⁾, Jarot Dwi Prasetyo ²⁾

¹⁾ Program Studi Teknologi Informasi, Universitas Ibrahimiyah

²⁾ Program Studi Ilmu Komputer, Universitas Ibrahimiyah

email: ¹⁾ luky.lukman7@gmail.com, ²⁾ jarot_dwi_prasetyo@yahoo.com

ARTICLE INFO

Article History:

Received : 05 October 2020

Revised : -

Accepted : 06 November 2020

Published : 11 December 2020

Keywords:

Information System

Control

Inspectorate

PKPT

IEEE style in citing this article:

L. F. Lidimilah, J. D. Prasetyo, and A. Homaidi, "Optimalisasi Sistem Informasi Untuk Efektifitas Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kabupaten Bondowoso", *Jurnal.ilmiah.informatika*, vol. 5, no. 2, pp. 93-107, Dec. 2020.

Corresponding Author:

Ahmad Homaidi

Universitas Ibrahimiyah

aidye89@gmail.com

ABSTRACT

The preparation of an annual supervisory work program (PKPT) requires a long process in order to get good and accurate results, because the process is done semi-computerized, which still involves a lot of staff in the Inspectorate. This makes the PKPT formulation process less effective and efficient. So that the supervisory work program that should have been able to be carried out quickly became constrained because of the long process in its preparation. Therefore, it is deemed necessary to design an application that can help facilitate the preparation of an annual monitoring work program with the waterfall method, making it easier for the inspectorate to determine audit objects and the implementation of supervision of predetermined objects. Based on the tests carried out, it was found that the application feasibility was 93%. From the results of these tests, this application can help make it easier for the inspectorate to provide an assessment of the level of risk, determine supervision plans and assignments to be more effective and efficient. So that efforts to become Good Governance and Clean Governance can be realized properly.

© 2020 Jurnal Ilmiah Informatika (Scientific Informatics Journal) with CC BY NC licence

1. PENDAHULUAN

Dalam rangka mendorong terwujudnya *good governance* dan *clean*

government serta mendukung penyelenggaraan pemerintah yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan bersih

serta bebas dari praktik-praktik Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), diperlukan pengawasan, utamanya pengawasan internal yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).[1][2][3][4] Inspektorat Kabupaten Bondowoso merupakan unsur pengawas pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.[5] Inspektorat kabupaten ini mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan urusan pemerintah dan tugas pembantuan perangkat daerah.[6]

Dengan penerapan manajemen resiko, inspektorat ingin memperoleh keyakinan bahwa hambatan yang mungkin timbul dalam rangka pencapaian tujuan telah dikelola dengan baik pada level yang dapat diterima.[7] Disisi lain, audit konvensional yang berbasis pengendalian (*control based audit*) lebih difokuskan pada peningkatan kualitas pengendalian berdasarkan standar auditor. Pengawasan intern berbasis resiko (PIBR) mengintegrasikan pengawasan intern ke dalam proses manajemen resiko yang dibangun organisasi, sehingga pengkomunikasian proses dan hasil pengawasan lebih mudah dipahami dan ditindaklanjuti oleh pimpinan organisasi.[8]

Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat meliputi seluruh kegiatan proses kegiatan audit, review, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya berupa asistensi, sosialisasi dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan yang akan dan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan

efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih.[9]

Dalam menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), inspektorat Bondowoso sudah menerapkan manajemen audit berbasis resiko dengan maksud dan tujuan agar resiko yang dihadapi auditor dapat diminimalisir dan temuan hasil audit dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu dapat mengurangi resiko yang dihadapi auditi dan dapat memberikan dukungan informasi mengenai resiko dalam menetapkan arah kebijakan.[10] Selama ini manajemen audit berbasis resiko yang dilaksanakan di Inspektorat Kabupaten Bondowoso ini masih dilakukan dengan model konvensional dengan melihat informasi terkait daftar objek audit dan besaran anggaran untuk menentukan resiko dan dampak yang akan timbul pada objek audit. Selanjutnya dilakukan evaluasi resiko yang merupakan suatu proses yang digunakan untuk menentukan prioritas jumlah objek audit. Setelah ditemukan objek-objek yang akan dilakukan audit berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan maka pihak inspektorat akan menyusun kebijakan teknis pengawasan sebagai dasar hukum dalam melaksanakan pengawasan, membentuk tim untuk melakukan pengawasan, melaksanakan administrasi inspektorat, dan menyusun laporan hasil pengawasan serta fungsi-fungsi lain yang menjadi wewenang inspektorat.

Proses penyusunan PKPT ini tentunya membutuhkan proses yang panjang agar mendapatkan hasil yang baik dan akurat, karena proses yang dilakukan dikerjakan secara semi terkomputerisasi (menggunakan *microsoft office*) yang masih banyak melibatkan tenaga pegawai inspektorat. Dengan hal ini tentunya membuat proses penyusunan PKPT menjadi kurang efektif dan efisien.

Sehingga program kerja pengawasan yang seharusnya dapat cepat dilakukan menjadi terkendala karena proses panjang dalam penyusunannya. Oleh karena itu, dirasa perlu untuk dirancang aplikasi yang dapat membantu mempermudah dalam penyusunan program kerja pengawasan tahunan dengan metode *waterfall* sehingga memudahkan pihak inspektorat dalam menentukan objek-objek audit serta pelaksanaan pengawasan terhadap objek yang sudah ditentukan. Sehingga aplikasi ini dapat dijadikan sebagai rujukan dalam pengambilan keputusan sehingga dapat mempercepat proses penyusunan PKPT dan menindaklanjuti dengan pengawasan untuk mewujudkan *good governance* dan *clean government*.

2. METODE PENELITIAN

Perancangan sistem ini menerapkan konsep *System Development Development Lyfe Cycle* (SDLC) dengan menerapkan metode *waterfall*. [11] Tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi beberapa tahapan sebagaimana yang berikut;

a. *Planning*

Pada tahapan ini dilakukan perencanaan kerangka konsep yang dari sistem yang akan dibangun untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pengguna, serta dilakukan studi kelayakan dari segi teknis maupun teknologi, serta skedul pelaksanaan penelitian. Tahapan ini melibatkan tim penelitian dan pihak Inspektorat Kabupaten Bondowoso.

b. *Analysis*

Tahap ini dilakukan requirement proses bisnis yang dijalankan dalam perencanaan PKPT tahunan berbasis resiko yang dilaksanakan di Inspektorat Bondowoso, kemudian melakukan analisa terhadap proses bisnis yang dijalankan serta

menganalisis kebutuhan sistem yang akan dibangun.

c. *Design*

Pada tahapan ini dilakukan pemodelan system untuk menggambarkan cara kerja sistem yang akan dibangun serta membuat rancangan desain interface yang dibutuhkan untuk memberikan gambaran sebelum diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman.

d. *Implementation*

Setelah dilakukan tahapan analisis dan design yang di dalamnya memuat gambaran sistem yang akan dibangun, selanjutnya menerjemahkan ke dalam bahasa pemrograman yang dalam hal ini dipilih bahasa pemrograman web menggunakan PHP, sehingga dihasilkan aplikasi berbasis *platform open source* yang mudah untuk dikembangkan.

e. *Testing*

Pada tahap ini dilakukan pengujian terhadap aplikasi yang sudah dibuat, untuk mengetahui cara kerja aplikasi dan mencari kesalahan-kesalahan dalam pengkodean sehingga dapat dipastikan aplikasi yang akan dirilis sudah sesuai dengan kebutuhan dan dapat dijalankan sesuai dengan harapan.

f. *Maintenance*

Tahap ini dilakukan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi pada aplikasi disaat trial, serta kemungkinan perubahan yang disebabkan ketidaksesuaian dengan proses-proses yang seharusnya dilakukan pada Inspektorat Bondowoso.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Identifikasi Proses Bisnis

Sistem Perencanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bondowoso sudah

menerapkan manajemen audit berbasis resiko untuk meminimalisir resiko yang dihadapi. Namun selama ini proses tersebut masih dilakukan secara semi terkomputerisasi yaitu pihak perencanaan menunggu laporan rencana anggaran tahunan dari instansi-instansi yang berada di bawah pengawasan inspektorat kabupaten Bondowoso, setelah berkas-berkas diterima barulah dimasukkan ke microsoft excel untuk dilakukan perhitungan peta resiko kemudian membuat ranking berdasarkan tingkat resiko yang dihasilkan dari perhitungan yang dibuat.

3.2 Analisis Kebutuhan Sistem

Kebutuhan fungsional yang dibutuhkan setelah dilakukan analisis terhadap proses yang dijalankan di Inspektorat Bondowoso secara garis besar dapat ditentukan sebagaimana berikut;

a. Penilaian Resiko

Proses bisnis penilaian resiko ini cara kerjanya dimulai dari penerimaan rancangan anggaran tahunan dari instansi-instansi yang kemudian dimasukkan ke dalam microsoft excel kemudian dibuat hitung tingkat resikonya dan selanjutnya di buat perankingan dari resiko terbesar sampai terkecil. Selanjutnya ditetapkan rencana pengawasan tahunan berdasarkan hasil perankingan yang telah dibuat.

b. Penugasan

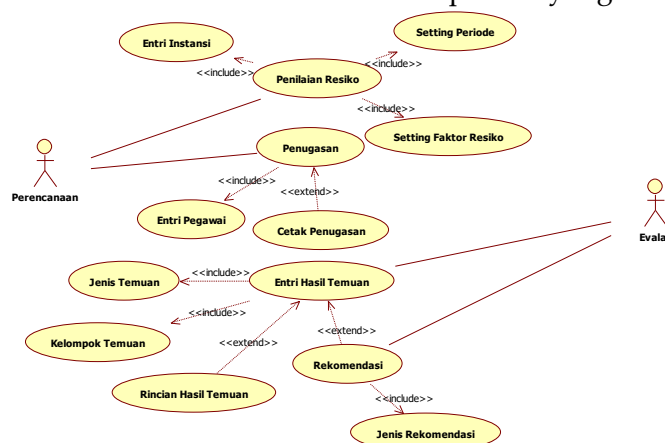
Proses bisnis penugasan ini merupakan proses menunjukan tim pengawas yang dibentuk oleh Inspektur Pembantu (Irbn). Pihak Irbn melakukan penunjukan terhadap tim pambantu penanggung jawab, pengendali, ketua serta anggota yang akan melakukan pengawasan serta menentukan jadwal tim untuk melakukan pengawasan.

c. Pelaporan

Proses pelaporan ini dilakukan setelah tim pengawasan telah melakukan pengawasan terhadap objek audit yang sudah ditentukan berdasarkan penilaian resiko. Kemudian setelah selesai melaksanakan tugasnya tim membuat laporan hasil pengawasan yang kemudian dilaporkan kepada Inspektur.

3.3 Use Case Diagram

Use case diagram merupakan diagram yang digunakan untuk memberikan gambaran perilaku aktor serta kaitannya dengan objek.[12] Berdasarkan use case diagram yang dibuat ini, dapat diketahui siapa saja aktor yang terlibat dalam sistem serta apa hak yang dapat dilakukan aktor tersebut dalam sistem. Sehingga ketika diimplementasikan ke dalam bahasa pemrograman sudah memberikan gambaran batasan yang harus ada pada setiap aktor yang telah ditentukan.



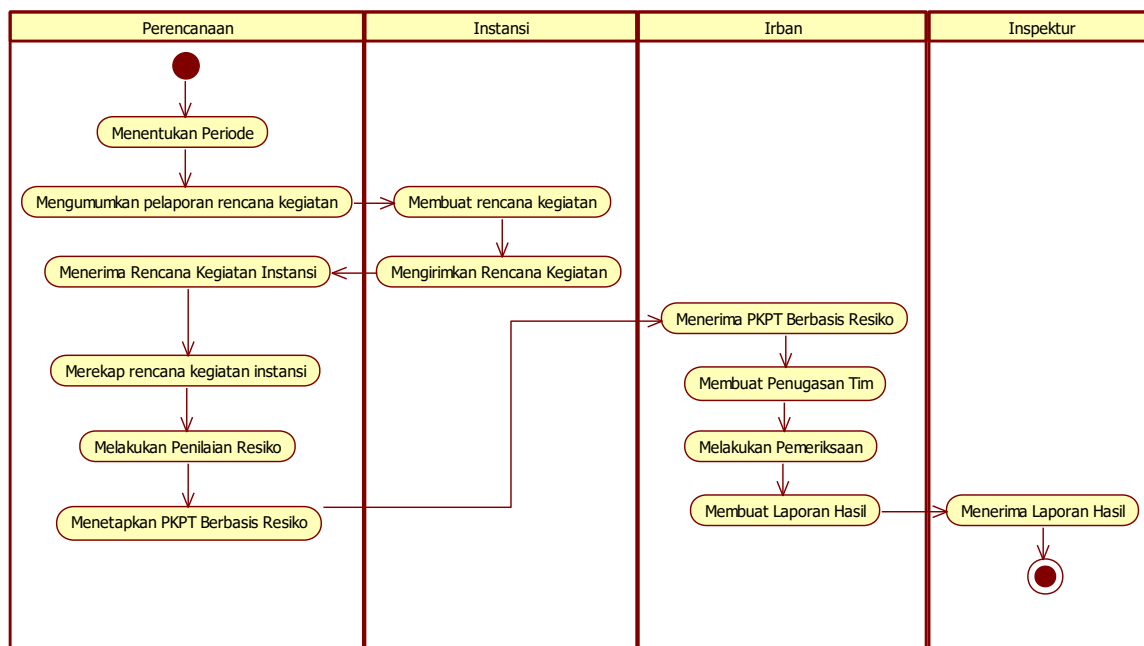
Gambar 1. Use Case Diagram

Dari use case diagram yang digambarkan pada gambar 1 tersebut dapat diketahui terdapat 2 aktor utama yang berperan dalam sistem yang dibangun. Pertama bagian perencanaan, tugas dari bagian ini adalah menentukan penilaian resiko serta membuat perankingan hasil penilaian resiko dan kemudian membuat penugasan tim. Selanjutnya aktor kedua adalah bagian Evaluasi dan Laporan (Evalap) yang bertugas melakukan pengawasan

kemudian memasukkan hasil temuannya berikut rinciannya serta juga menentukan rekomendasi dari temuan.

3.4 Activity Diagram

Activity Diagram disini digunakan untuk menggambarkan aliran proses yang dilakukan oleh aktor, sehingga dapat diketahui dimulai dari mana dan berakhir dimana.[5][13] Activity diagram dari program kerja pengawasan tahunan yang dibangun dapat digambarkan sebagaimana berikut ini;



Gambar 2. Activity Diagram

Dari activity diagram pada gambar 2 tersebut dapat dipahami bahwa dalam proses yang ada di Inspektorat Bondowoso diawali oleh bagian perencanaan yang membuat periode kemudian mengumumkan pelaporan rencana kegiatan berikut anggaran biaya dalam satu tahun, selanjutnya pihak instansi membuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan kemudian dikirimkan ke Inspektorat. Setelah pihak inspektorat menerima seluruh rencana kegiatan dari instansi kemudian bagian perencanaan melakukan penilaian resiko serta membuat ranking dari resiko yang paling besar

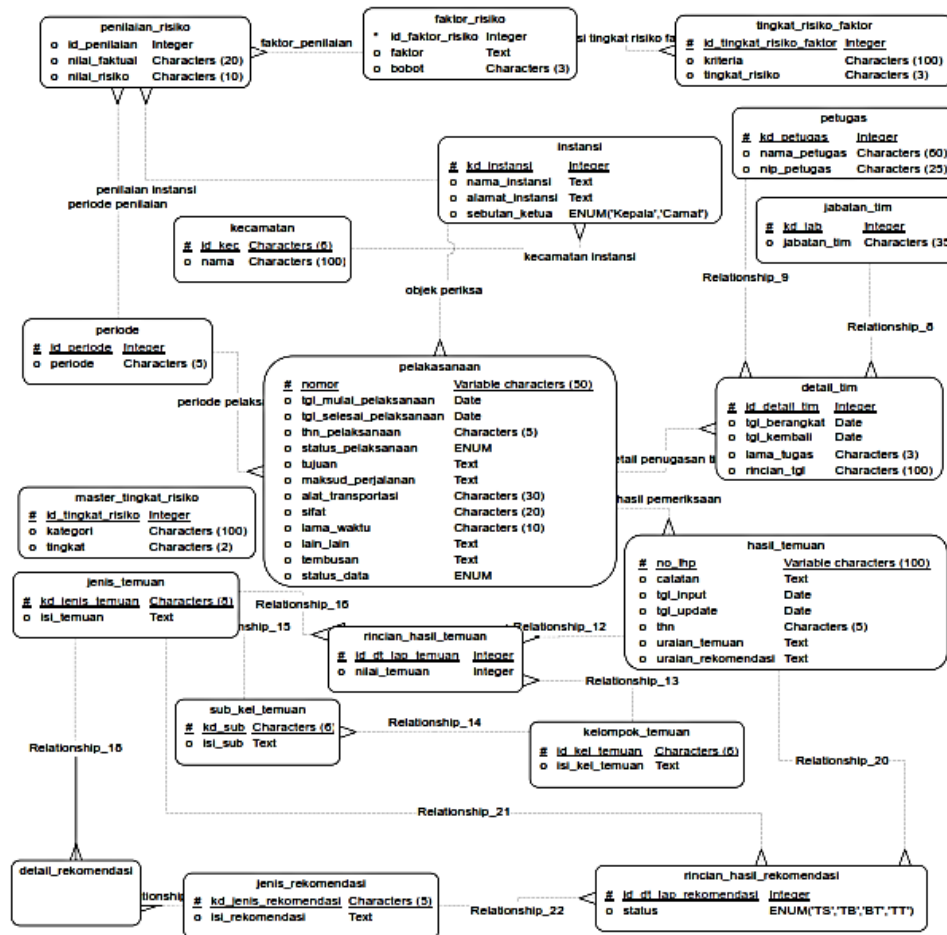
sampai yang terkecil, dan hasil perankingan inilah yang nantinya dibuat program pengawasan dalam jangka satu tahun kedepan.

3.5 Perancangan Database

Database merupakan sekumpulan data-data yang saling berkaitan yang dibentuk untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan. Dalam perancangan sistem program kerja pengawasan tahunan di Inspektorat Bondowoso ini digunakan untuk melakukan penyimpanan terhadap data-data penilaian resiko, perankingan, penugasan, pelaporan hasil pengawasan serta rekomendasi dari hasil pengawasan

yang dilakukan. Dalam merancang database digunakan pemodelan dengan *Entity Relationship Diagram* (ER-Diagram). ER-Diagram merupakan salah satu pemodelan sistem yang menggambarkan

keterkaitan (hubungan) antar data.[14] Untuk rancangan ER-Diagram dari Sistem Program Kerja Pengawasan Tahunan ini dapat dilihat sebagaimana gambar 3 berikut ini;



Gambar 3. ER-Diagram

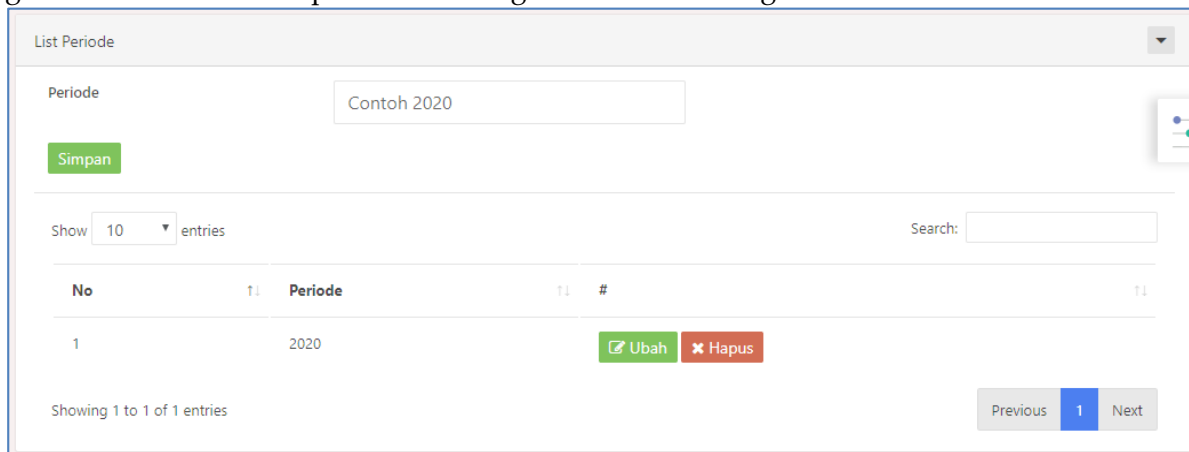
Dari gambar 3 tersebut dapat diketahui cardinalitas dari antar entity yang dibuat dalam ER-Diagram tersebut, sehingga nampak relasi antar entity yang telah dibuat. Entity yang dibuat dalam ER-Diagram tersebut merupakan calon tabel yang nantinya dapat digenerate ke dalam database. Ketika perancangan ER-Diagram *Conceptual Data Model* sudah dinyatakan sesuai dengan kebutuhan fungsional selanjutnya dilakukan generate menjadi *Physical Data Model* yang kemudian dilanjutkan mengenerate menjadi *Structure Query Language* (SQL) yang kemudian dijalankan untuk membentuk database yang dibutuhkan.

3.6 Implementasi

Sistem Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang dibangun ini diimplementasikan dengan menggunakan bahasa pemrograman web menggunakan PHP dan database MySQL. Oleh karena itu, untuk menjalankan aplikasi ini user tinggal membuka browser kemudian membuka alamat yang telah ditentukan. Untuk mengakses fitur dari sistem yang dibangun user harus terlebih dahulu login menggunakan akun yang telah ditentukan sehingga user dapat mengakses menu sesuai dengan hak yang telah ditentukan sebelumnya.

Aplikasi ini dapat dijalankan dengan mengikuti tahapan-tahapan dalam proses bisnis sebagaimana digambarkan dalam activity diagram pada gambar 2. Tahapan tersebut dimulai dari perencanaan yang telah menerima laporan rancangan

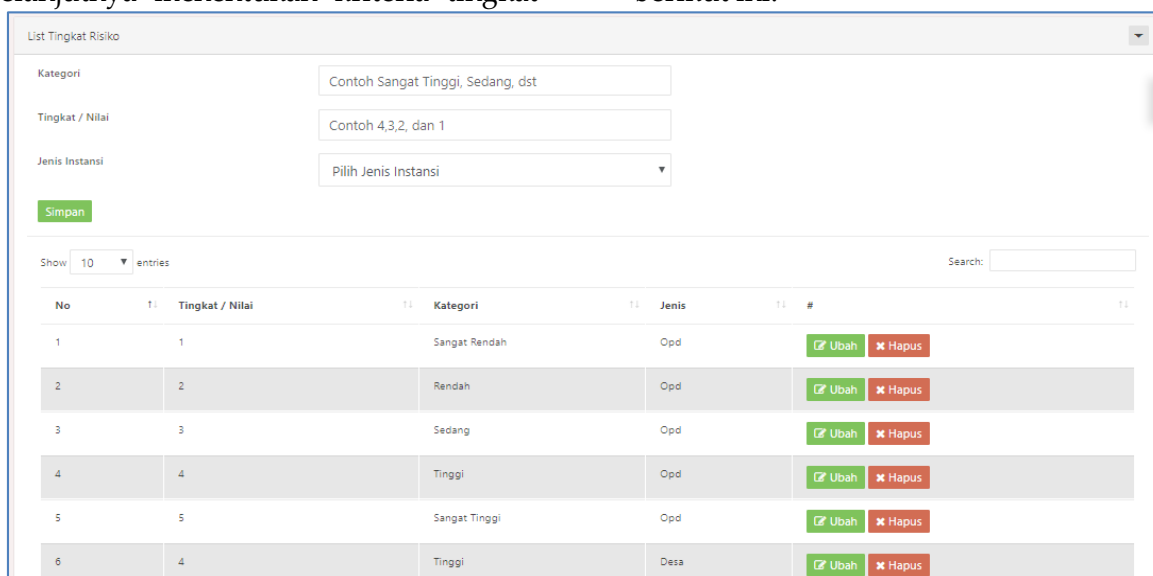
anggaran belanja tahun yang telah dibuat oleh setiap instansi-instansi yang berada di bawah pengawasan Inspektorat Bondowoso. Tahapan dalam menentukan faktor resiko ini dapat digambarkan melalui gambar 4 berikut ini.



Gambar 4. Form Periode

Pada gambar 4 tersebut digunakan untuk menambah periode sekaligus menampilkan daftar periode. Periode ini digunakan untuk melakukan setting masa pembuatan penilaian resiko serta membuat rencana pemantauan yang akan dilaksanakan selama satu tahun ke depan. Selanjutnya menentukan kriteria tingkat

resiko dengan memberikan penilaian dengan interval 1 sampai 5 baik untuk OPD, Desa, dan Sekolah yang berada di bawah pengawasan Inspektorat Kabupaten Bondowoso. Kategori tingkat resiko sebagaimana dijelaskan sebelumnya dapat dilihat sebagaimana gambar 5. berikut ini:



Gambar 5. Kategori Tingkat Resiko

Selanjutnya adalah menentukan faktor resiko, dalam faktor resiko disini ditentukan bobot dari faktor-faktor yang

berpengaruh terhadap resiko. Pemberian bobot disini dilakukan untuk semua jenis instansi, baik OPD, sekolah maupun desa.

No	Faktor	Bobot (%)	Jenis	Aktif	#
1	Jumlah Program OPD yang mendukung Program Prioritas Bupati	50	Opd	Y	Ubah
2	Jumlah Anggaran	30	Opd	Y	Ubah
3	Jumlah Temuan BPK	20	Opd	Y	Ubah
4	Jumlah Anggaran	40	Desa	Y	Ubah
5	Jumlah Temuan Sebelumnya	35	Desa	Y	Ubah

Gambar 6. List Faktor Resiko

Kemudian setelah itu disiapkan terlebih dahulu Tingkat Faktor Resiko yang merujuk kepada nominal anggaran yang telah ditetapkan. Tingkat faktor resiko ini juga diberikan penilaian mulai

dari 1 sampai dengan 5 sebagai nilai yang paling tinggi. Form Penentuan Tingkat Faktor Resiko dapat dilihat sebagaimana gambar 7 berikut ini;

No	Tingkat / Nilai	Kriteria	Faktor Risiko	Jenis	#
1	1	<1250000000	Jumlah Anggaran	Desa	Ubah Hapus
2	2	>=1250000000	Jumlah Anggaran	Desa	Ubah Hapus
3	3	>=1500000001	Jumlah Anggaran	Desa	Ubah Hapus
4	4	>=1750000001	Jumlah Anggaran	Desa	Ubah Hapus
5	5	>2000000000	Jumlah Anggaran	Desa	Ubah Hapus

Gambar 7. Form dan List Tingkat Faktor Resiko

Selanjutnya dilanjutkan ke proses penilaian resiko. Penilaian resiko disini dilakukan dengan memilih jenis instansi yang akan dinilai yang meliputi 4 pilihan yaitu OPD, Desa, Sekolah dan Kelurahan. Setelah dilakukan pemilihan nantinya akan ditampilkan data-data instansi sesuai

dengan kriteria pilihan yang telah dipilih. Kemudian dari list data tersebut dapat dimunculkan faktor resiko, nilai faktual, kriteria faktor resiko serta nilai resiko yang kemudian dapat disesuaikan kembali ketika mungkin ada kesalahan pemberian nilai, dan selanjutnya disimpan untuk

melakukan generate hasil penilaian resiko yang telah ditentukan. Dalam hal ini dicontohkan untuk pemilihan instansi

yang dipilih adalah OPD, contoh penilaian dapat dilihat sebagaimana gambar 8 berikut ini;

No	Instansi	Faktor Risiko	Nilai Faktual	Kriteria Tingkat Risiko	Nilai Risiko
1	Badan Kepegawaian Daerah	Jumlah Program OPD yang mendukung Program Prioritas Bupati	4	3-4	1
		Jumlah Anggaran	4.769.381.700	Antara 3 Milyar s/d 5 Milyar	1,2
		Jumlah Temuan BPK	0	0	0
2	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Jumlah Program OPD yang mendukung Program Prioritas Bupati	3	3-4	1
		Jumlah Anggaran	2.384.700.000	Antara 1.5 Milyar s/d 3 Milyar	0,9
		Jumlah Temuan BPK	0	0	0
		Jumlah Program OPD yang mendukung Program Prioritas Bupati	3	3-4	1

Gambar 8. Penilaian Resiko

Setelah dilakukan penilian resiko sebagaimana digambarkan pada gambar 8 maka hasilnya dapat dijadikan dasar untuk membuat rencana Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) di inspektorat. Data-data yang telah

disimpan tersebut sudah otomatis dirangking berdasarkan hasil akhir dari kriteria-kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya dan hasilnya dapat dilihat sebagaimana gambar 9 berikut ini;

No	Instansi	Faktor Risiko	Nilai Faktual	Kriteria Tingkat Risiko	Nilai Risiko
1	Badan Kepegawaian Daerah	Jumlah Program OPD yang mendukung Program Prioritas Bupati	4	2	1
		Jumlah Anggaran	4.769.381.700	4	1,2
		Jumlah Temuan BPK	0	0	0
2	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Jumlah Program OPD yang mendukung Program Prioritas Bupati	3	2	1
		Jumlah Anggaran	2.384.700.000	3	0,9
		Jumlah Temuan BPK	0	0	0
		Jumlah Program OPD yang mendukung Program Prioritas Bupati	3	2	1

Gambar 9. Hasil Penilaian Resiko

Dari gambar 9 tersebut sudah terlihat hasil penilaian yang telah ditentukan sebelumnya dan skor akhir dari penilaian tersebut sudah terlihat dan otomatis juga

sudah dapat diurutkan berdasarkan nilai paling tinggi resikonya. Sehingga bagian perencanaan tidak perlu repot-repot merangking kembali hasil dari rekapitulasi

yang sudah digenerate melalui aplikasi. Namun dalam upaya tidak memudahkan bagian perencanaan dalam aplikasi ini juga disediakan export untuk merekap hasil

penilaian resiko dalam bentuk excel. Contoh hasil rekapitulasi dari penilaian resiko yang telah digenerate dari aplikasi dapat dilihat sebagaimana gambar 10.

REKAPITULASI PENILAIAN RESIKO PERIODE 2020			
No	Instansi	Tingkat Risiko	Kategori
1	Badan Pendapatan Daerah	3,00	Sedang
2	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	3,00	Sedang
3	Badan Kepegawaian Daerah	2,20	Sedang
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2,20	Sedang
5	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	1,90	Rendah

Gambar 10. Hasil Rekapitulasi Penilaian Resiko

Kemudian setelah dilakukan perangkingan, maka dapat dilanjutkan ke proses penugasan untuk menunjuk tim pengawas yang akan melakukan pengawasan terhadap instansi yang

memiliki tingkat resiko dari paling tinggi. Proses penugasan dilakukan dengan memilih periode dan jenis instansi yang akan direncanakan untuk dilakukan pengawasan.

Gambar 11. List Penugasan Tim

Dari list daftar instansi yang akan dilakukan pengawasan sebagaimana gambar 11, untuk penugasan tim dapat dilakukan dengan memilih instansi yang akan dibuat penugasannya kemudian dilanjutkan untuk mengisi form penugasan yang di dalamnya memuat nomor surat, jenis pemeriksaan,

penanggung jawab, pengendali teknis, ketua tim, anggota tim, dan waktu pelaksanaan pengawasan. Nantinya dari pengisian form penugasan sebagaimana yang digambarkan pada gambar 12, bagian perencanaan tidak perlu membuat penugasan dengan manual dan membuat suratnya juga sudah otomatis tergenerate.

Gambar 12. Form Penugasan Tim

Dari hasil penugasan yang dibuat sebagaimana gambar 12 tersebut, maka setelah disimpan akan nampak list data penugasan yang telah dibuat. Dari list data tersebut terdapat aksi yang disediakan untuk mencetak beberapa administrasi


dalam melakukan pengawasan meliputi surat pengantar, surat tugas, SPPD, serta edit aspek yang dibutuhkan perubahan. List data yang dihasilkan dapat digambarkan sebagaimana gambar 13 berikut ini.

No	Obyek Pemeriksaan	Tahun	Tgl Mulai	Tgl Selesai	Tujuan / Untuk	No. Surat	Sifat Surat	#
1	Desa Sucolor, Desa Pujer Baru	2020	17 September 2020	24 September 2020	Pemeriksaan Operasional	44444444	penting	
2	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	2020	20 Juli 2020	30 Juli 2020	Melaksanakan Pemeriksaan Operasional	090/108/430.8/2020	Penting	
3	Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol	2020	20 Juli 2020	30 Juli 2020	Melaksanakan Pemeriksaan Operasional	090/109/430.8/2020	Penting	
4	Badan Kepegawaian	2020	20 Juli 2020	30 Juli 2020	Melaksanakan Pemeriksaan	090/110/430.8/2020	Penting	

Gambar 13. List Pelaksanaan PKPT

Dari gambar 13 tersebut dapat diketahui bahwa segala administrasi dalam melaksanakan pemeriksaan atau pengawasan oleh tim sudah disediakan oleh aplikasi dan tim hanya tinggal mencetak dan meminta pengesahan saja. Hal ini tentunya memudahkan kepada bagian yang mengurus administrasi dikarenakan segala kebutuhan administrasi telah lengkap dan tim hanya tinggal melaksanakan tugas pengawasan saja. Pada bagian ini juga bagian Evalap dapat melakukan perubahan tim pengawas jika

sewaktu-waktu diperlukan komposisi tim pengawas, begitu juga untuk perubahan objek pemeriksaan, aspek pemeriksaan serta waktu pelaksanaan, tidak lupa juga dasar hukum yang menjadi landasan dalam pemeriksaan yang dilakukan. Sehingga seluruh aspek penunjang dalam pelaksanaan pemeriksaan sesuai dengan aturan dan tepat sasaran. Dari sekian administrasi yang diperlukan saat akan melaksanakan pengawasan, gambar 14 berikut ini contoh surat tugas yang dihasilkan dari aplikasi.



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
INSPEKTORAT
 Jalan Ahmad Yani No. 19 Telp. (0332) 422574 Fax. (0332) 422574
 e-mail : admin@bondowosokab.go.id, Website : http://www.bondowosokab.go.id
BONDOWOSO
 Kode Pos 68211

SURAT TUGAS
 NOMOR : 090/108/430.8/2020

DASAR : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 08 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso
 5. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Bondowoso

MENUGASKAN :

KEPADA :

NO	NAMA	JABATAN TIM	WAKTU
1	Miftakul Ulum, SE, MSi	Pembantu Penanggung Jawab	Hari
2	Eko Satrio Utomo, SE, M.Si	Pengendali Teknis	Hari
3	Endah Sulistiyowati, SE	Ketua Tim	Hari
4	Zikri Assyura, ST	Anggota	Hari

UNTUK : Melaksanakan Pemeriksaan Operasional pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Tahun Anggaran 2019-2020 dengan sasaran pemeriksaan meliputi :
 1. Aspek Keuangan Daerah
 2. Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah

WAKTU : Selama dalam waktu 9 hari kerja efektif terhitung mulai tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan 30 Juli 2020

Kepada pihak-pihak yang bersangkutan diminta untuk memberikan bantuan serta keterangan-keterangan yang diperlukan guna kelancaran dalam penyelesaian tugas dimaksud.
 Seluruh biaya kegiatan diatas dibebankan pada Anggaran Inspektorat Kabupaten Bondowoso.

Gambar 14. Surat Tugas

Berdasarkan surat tugas yang dihasilkan dari aplikasi, selanjutnya tim pelaksana dapat melaksanakan pemeriksaan terhadap objek sesuai dengan rentang waktu yang terdapat pada surat tugas. Setelah tim pelaksana selesai

melaksanakan pemeriksaan, selanjutnya tim dapat membuat laporan hasil tindak lanjut temuan dan memasukkan ke dalam aplikasi melalui form yang telah disiapkan memuat nomor LHP dan sebagainya, sebagaimana gambar 15 berikut ini.

Form Laporan Tindak Lanjut Hasil Temuan / Kesalahan

No LHP *

No Surat Tugas *

Instansi *

Temuan *

Uraian Temuan

Rekomendasi *

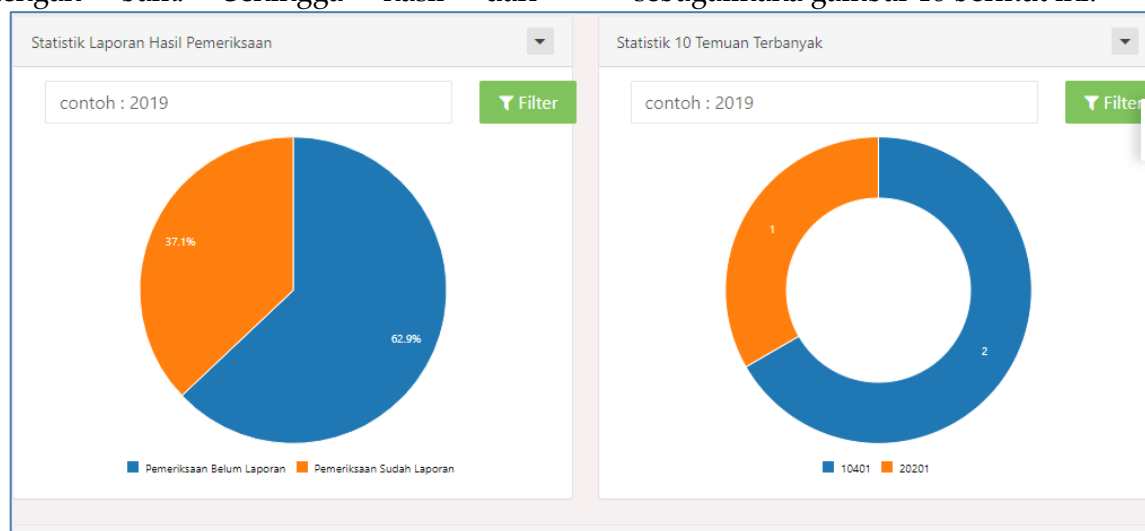
Uraian Rekomendasi

Tanggal Input Laporan *

Gambar 15. Form Laporan Tindak Lanjut Hasil Temuan

Dari hasil pemeriksaan yang kemudian dilaporkan melalui form tindak lanjut hasil temuan, maka seluruh data tersimpan dalam database dan terekap seluruhnya dengan baik. Sehingga hasil dari

pemeriksaan tersebut dapat dijadikan laporan dengan mudah dan sistematis. Selain itu hasil pemeriksaan dapat dimunculkan dalam bentuk grafik sebagaimana gambar 16 berikut ini.



Gambar 16. Grafik Hasil Pemeriksaan dan Temuan

3.7 Hasil Pengujian

Agar aplikasi yang dibangun sesuai dengan kebutuhan pengguna, maka diperlukan skenario pengujian untuk mengetahui kelayakan aplikasi untuk digunakan secara keberlanjutan atau masih diperlukan perbaikan serta

penambahan fitur untuk melengkapi proses bisnis. Pengujian yang dilakukan adalah dengan menggunakan *Web Quality Evaluation Method*, yang di dalamnya dilakukan pengujian terkait *functionally*, *reliability*, *usability*, dan juga *efficiency*. [15]

Tabel 1. Hasil Pengujian

Aspek	Skor			Kriteria
	Aktual	Ideal	%	
<i>Functionally</i>	190	200	95	Sangat Baik
<i>Reliability</i>	267	300	89	Baik
<i>Usability</i>	231	250	92	Sangat Baik
<i>Efficiency</i>	142	150	95	Sangat Baik
Total	830	900	93	Sangat Baik

Dari hasil pengujian yang dilakukan dapat diketahui hasil uji kelayakan adalah 93%. Pengujian dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai peran langsung penting dalam perencanaan dan pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Bondowoso. Dari pengujian yang

dilakukan oleh pihak yang memiliki peran tersebut, dapat diketahui kelebihan dari aplikasi yang dibangun serta kekurangannya, sehingga dengan diketahui kelebihan dan kekurangannya dapat menjadi catatan rekomendasi untuk pengembangan aplikasi. Secara garis besar, pihak yang melakukan pengujian

menyatakan kepuasannya, dan menjadi rekomendasi penggunaan aplikasi untuk membantu mempercepat proses perencanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan serta mempermudah dalam menentukan objek pemeriksaan dan juga mempercepat proses penugasan dan segala bentuk administrasi yang dibutuhkan. Selain itu data-data dari perencanaan sampai laporan hasil pemeriksaan berkesinambungan dan saling memiliki keterkaitan. Sehingga dengan adanya aplikasi ini, terciptanya *Good Governance* dan *Clean Governance* dapat dilaksanakan dengan baik.

4. UCAPAN TERIMA KASIH

Terlaksana penelitian ini tidak lepas dari kontribusi serta dukungan dari beberapa pihak yang ikut dalam mendanai serta memberikan informasi terhadap topik penelitian yang kami laksanakan. Oleh karena itu, kami ucapkan terima kasih kepada Kementerian Riset dan Teknologi / Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia yang telah memberikan pendanaan penelitian ini, serta pihak Inspektorat Kabupaten Bondowoso yang memberi ijin untuk melaksanakan penelitian dan juga proaktif dalam memberikan informasi dan data terkait topik penelitian yang dilaksanakan.

5. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan didapatkan bahwa proses perencanaan program kerja pengawasan tahunan Inspektorat Bondowoso menggunakan model semi terkomputerisasi sehingga membutuhkan ketelitian dan waktu yang cukup lama dalam memprosesnya. Lebih-lebih dalam mengidentifikasi tingkat resiko dari masing-masing instansi yang berada di bawah pengawasan Inspektorat. Dengan penelitian yang dilakukan dapat membantu mempercepat proses pembuatan perencanaan dengan menilai

tingkat resiko yang kriterianya dimasukkan sebagai master dan kemudian memberikan penilaian tingkat resiko dengan menggenerate langsung dari aplikasi. Hal ini memudahkan bagian perencanaan dan juga dalam membuat penugasan menjadi lebih efektif dan efisien karena segala administrasi yang dibutuhkan untuk menunjang proses pemeriksaan sudah tersedia dengan sekali generate dari aplikasi. Sehingga upaya untuk menjadi *Good Governance* yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bondowoso dapat terwujud serta dapat menunjang upaya untuk menjadikan pemerintahan yang bersih (*Clean Governace*) dapat diwujudkan dengan adanya aplikasi yang dapat dikontrol dari mulai proses perencanaan sampai laporan hasil pemeriksaan.

6. REFERENSI

- [1] A. Nasir and A. Gunawan, "Implementasi Good Governance dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah untuk Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat)," 2019.
- [2] Mujannah and B. Artinah, "Analisis Sistem Pengendalian Internal Melalui Audit Berbasis Risiko (ABR) Oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Dalam Mencapai Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Studi Kasus pada Inspektorat Kota Banjarbaru," *J. Akunt. Maranatha*, 2018, doi: 10.28932/jam.v10i2.1077.
- [3] R. Sumanti, "Upaya Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Aceh Melalui Internal Audit Capability Model (IACM)," *J. Borneo Adm.*, 2020, doi: 10.24258/jba.v16i2.654.
- [4] A. Homaidi and S. Ibad, "Improving

- the Quality of Public Complaints Services in Realizing Good Governance in Bondowoso District Inspectorate," *J. Public Adm. Gov.*, 2019, doi: 10.5296/jpag.v9i3.15250.
- [5] A. Homaidi and S. Ibad, "Analisis Pemodelan Sistem Pengaduan Kasus Menggunakan Object Oriented Method (Unified Modelling Language)," *J. Ilm. Inform.*, 2019, doi: 10.35316/jimi.v4i1.487.
- [6] A. Homaidi and S. Ibad, "Aplikasi Pengaduan Kasus Inspektorat Kabupaten Bondowoso," in *Conference on Innovation and Application of Science and Technology*, Oct. 2019, pp. 339–346.
- [7] F. M. Ahmad, "Analisis Manajemen Risiko Dalam Mewujudkan Good Governance Pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat," in *Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar*, 2019, pp. 1182–1192.
- [8] L. M. D. Budiman, "Penerapan Risk Based Audit Untuk Meningkatkan Efektifitas Siklus Penjualan Pada PT. 'X' Di Surabaya," *CALYPTRA*, 2013, doi: 10.24123/jimus.v2i1.100.
- [9] I. A. Kumalasari, "Risk Based Audit Atas Penjualan (studi kasus pada PT. United Motors Centre)," *J. Imu dan Ris. Akutansi*, 2016.
- [10] M. Widodo, "Audit Berbasis Resiko Pada PT. SP," *JEK - J. Ekon. dan Kewirausahaan Kreat.*, vol. 3, no. 2, pp. 63–73, 2018.
- [11] A. Behori and B. Alamin, "E-Notulen Rapat di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo," *J. Ilm. Inform.*, vol. 3, no. 1, pp. 199–205, 2018, [Online]. Available: <http://ejournal.amiki.ac.id/index.php/JIMI/article/view/70>.
- [12] I. Yunita and M. A. Ridla, "Perancangan dan Implementasi Sistem Informasi Pelayanan Jam'iyah Umroh Hafas," *J. Ilm. Inform.*, 2019, doi: 10.35316/jimi.v4i2.533.
- [13] A. Homaidi and A. Lina, "Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Berbasis Web dalam Rangka Mendukung Evaluasi Kinerja Akademik dan Dosen di Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Ibrahimy," *Appl. Technol. Comput. Sci. J.*, 2019, doi: 10.33086/atcsj.v2i1.1125.
- [14] L. F. Lidimilah and Hermanto, "Sistem Informasi Bank Sampah Sukorejo Berbasis Client Server," *J. Ilm. Inform.*, vol. 3, no. 1, pp. 193–198, 2018.
- [15] A. Homaidi, "Perancangan Dan Implementasi E-Thesis Untuk Tugas Akhir Mahasiswa Universitas Ibrahimy Situbondo," *NJCA (Nusantara J. Comput. Its Appl.)*, 2019, doi: 10.36564/njca.v4i1.109.